

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN INSPEKTORAT
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)**

Oleh :

Tissa Nurul Husna

Pembimbing : Muhammad Rasuli dan Devi Safitri

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : tissanurulhusna@yahoo.co.id

*Effect of Human Resources Competency, Local Financial Accounting System
Implementation, The Use Of Information Technology, Internal
Control Systems towards The Quality and role of inspectorat
of the quality of the financial statements*

ABSTRACT

The sample in this study was determined by using purposive sampling method in total there are 32 SKPD in Pekanbaru city. The analytical method used in this research is multiple regression analysis using SPSS v16. The purpose of this study was to test the competence Effect of Human Resources, the Regional System of Financial Accounting, Information Technology Utilization, Internal Control System, and the role of the Inspectorate to the quality of financial statements. Respondents in this study is the structural officials involved in drafting the budget. The results showed that: 1) Effect of Human Resources positively affect the quality of financial reports with significant value 0,000 <0,05.2), Regional Financial Accounting System significantly influence the quality of financial statements with significant value 0,000 <0.05.3) the utilization of the positive impact of Information Technology and significant impact on the quality of financial statements with significant value 0,000 <0.05.4) Internal Control System a significant effect on the quality of financial statements with significant value 0.001 <0.05.5) the role of the Inspectorate significant positive effect on the quality of financial statements with significant value 0,019 <0,05.

Keyword : competence, accounting sistem, information technology, internal control, inspectorate, quality.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap

praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik daerah, dan berbagai organisasi lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan

menyediakan/memproduksi barang-barang publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK./05.2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pimpinan instansi selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2010), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah dan belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri mungkin juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan Laporan Keuangan, pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal yang terakhir yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran inspektorat. Menurut anggraeni (2014) tidak melaksanakan wewenang pihak lain dalam perusahaan, tugas tugasnya adalah melaporkan hasil temuan audit kepada orang yang benar benar berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 4) Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 5) Apakah Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3) Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. 4) Menganalisis pengaruh penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 5) Menganalisis pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pemakai. serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2012) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutkan sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Peran Inspektorat

Sejak adanya program reformasi birokrasi pada departemen keuangan, ITJEN kementerian keuangan mulai berbenah dan senantiasa mencoba menjalankan perannya sebagai aparat pengawas internal departemen. Layaknya unit internal audit yang memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi kelemahan kelemahan inefisiensi, dan inefektivitas (kegagalan) dari berbagai program yang telah direncanakan dalam organisasi, demikian pula halnya ITJEN kementerian keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ITJEN kementerian keuangan berusaha untuk menjadi aparat pengawas intern yang modern dan benar dalam menjalankan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian diatas, maka Kompetensi merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seorang individu dalam melaksanakan tugas yang ditekankan kepadanya dalam organisasi (LAN, 2008). Jadi, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya (Fitria, 2015). hipotesis pertama yang dapat diajukan adalah **Ha1** : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh	penerapan	Sistem
Akuntansi	Keuangan	Daerah

(SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah **Ha2** : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat

diajukan adalah **Ha3** : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang dapat diajukan adalah **Ha4** : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Internal auditor memainkan peranan penting pada pencegahan kecurangan pelaporan keuangan dan mengurangi biaya signifikan yang berhubungan dengan aktivitas serupa. Pertimbangan auditor internal terhadap fraud untuk menjelaskan fluktuasi pada piutang dipengaruhi oleh karakteristik khusus perusahaan, termasuk risiko inheren dan risiko pengendalian.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima yang dapat diajukan adalah **Ha5** : Peran Inspektorat berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari sumber pertamanya. Data Primer berupa jawaban langsung dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada Kepala Dinas, Sub Bagian Keuangan dan 1 Staf Keuangan yang bekerja di SKPD Kota Pekanbaru.

Metode pengiriman kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada masing-masing SKPD untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada SKPD tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah (Y). Menurut Halim (2012), laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang

merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Variabel independen yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber daya Manusia (X1). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah suatu keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang terlibat dalam suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Turwirdani, 2015).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2). Dalam peraturan menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemanfaatan teknologi informasi (X3) merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wahana komputer, 2010)

Sistem Pengendalian Intern (X4) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu

organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Peran Internal Audit (X5). Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Dalam hal ini peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi data yang digunakan untuk setiap variabel. Nilai yang diamati dalam analisis ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviat ion
Kompeten si Sumber Daya Manusia	78	18.00	45.00	32.39 74	5.8561 5

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	78	13.00	25.00	19.52 56	2.5973 2
Pemanfaat an Teknologi Informasi	78	19.00	40.00	30.96 15	4.6999 4
Penerapan Sistem Pengendal ian Intern	78	33.00	75.00	56.84 62	9.8417 0
Peran Inspektora t	78	30.00	70.00	53.64 10	10.112 32
Kualitas Laporan Keuangan	78	35.00	65.00	49.51 28	7.3462 5
Valid N (listwise)	78				

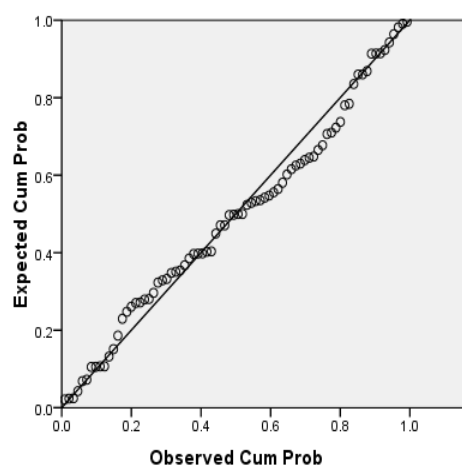
Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut hasil uji normalitas pada gambar 1.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Gambar diatas terlihat data tersebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data dapat terpenuhi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Apabila nilai $VIF < 10$ dan *tolerance* $> 0,10$ berarti tidak multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Dari hasil olah data yang terlihat pada tabel dapat dilihat bahwa tidak ada terjadi masalah multikolinieritas dalam model. Hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabel yang diamati.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

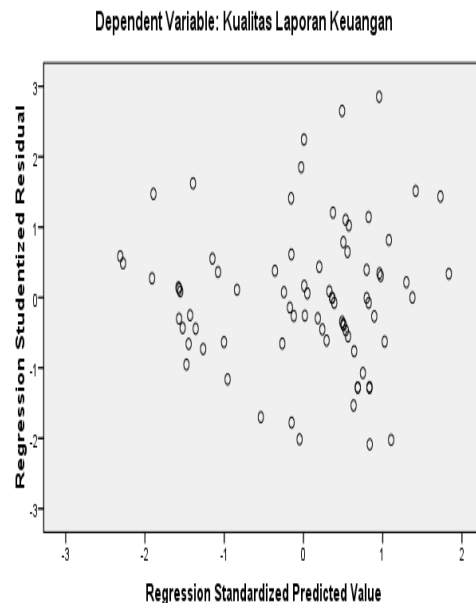
variabel	collinearity statistics		keterangan
	Tolerance	vif	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.548	1.825	bebas multikolin earitas
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	.482	2.075	bebas multikolin earitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.597	1.675	bebas multikolin earitas
Penerapan Sistem Pengendalian intern	.252	3.969	bebas multikolin earitas
Peran nspektorat	.234	4.269	bebas multikolin earitas

Sumber: Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Multikolinearitas



Sumber: Data Olahan, 2016.

Pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi ini layak untuk memprediksi Kualitas laporan keuangan pemda berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, peran inspektorat.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi hipotesis pertama dengan metode analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-3.362	2.524		-1.332	.187
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.296	.068	.236	4.317	.000
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	.571	.165	.202	3.471	.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.340	.082	.217	4.156	.000
Penerapan Sistem Pengendalian Intern	.243	.060	.325	4.037	.000
Peran Inspektorat	.146	.061	.201	2.409	.019

Sumber: Data Olahan, 2016.

Uji t

1. Kompetensi sumber daya manusia. diketahui t hitung 4.317 > t tabel 1,99 dan Sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan. Diketahui t hitung 3.471 > t tabel 1,99 dan Sig. 0,001 < 0,05. Artinya variabel Penerapan sistem akuntansi keuangan

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pemanfaatan teknologi informasi. Diketahui t hitung 4.156 > t tabel 1,99 dan Sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penerapan sistem pengendalian internal. Diketahui t hitung 4,037 > t tabel 1,99 dan Sig. 0,000 < 0,05. Artinya variabel Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Peran inspektorat. Diketahui t hitung 2,409 > t tabel 1,99 dan Sig. 0,019 < 0,05. Artinya variabel peran inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Persamaan Regresi Berganda :

$$Y = -3.362 + 0.296X_1 + 0.571X_2 + 0.340X_3 + 0.243X_4 + 0.146X_5 + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Konstanta sebesar -3.362 menyatakan apabila semua variabel independen (kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, peran inspektorat) dianggap konstan (bernilai 0), maka kualitas laporan keuangan sebesar 3.362

- Koefisien regresi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,296 menyatakan bahwa setiap peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan Keuangan sebesar 0,296 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Koefisien regresi untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, sebesar 0,571 menyatakan bahwa setiap peningkatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan Keuangan sebesar 0,571 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Koefisien regresi untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasisebesar 0,340 menyatakan bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasisebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan Keuangan sebesar 0,340 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Koefisien regresi untuk variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internsebesar 0,243 menyatakan bahwa setiap peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internsebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan Keuangan sebesar 0,243 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Koefisien regresi untuk Peran Inspektorat sebesar 0,146 menyatakan bahwa setiap peningkatan Peran Inspektorat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan Keuangan sebesar 0,146 dengan asumsi variabel lain tetap.

Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai

pengaruh Y tetapi tidak dimaksudkan ke dalam persamaan.

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dari tabel 3 dapat dilihat atau diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,317 dan signifikansinya sebesar 0,000. Nilai sig (0,000) < 0,05, ini menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan H_1 diterima. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011).

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dari tabel 3 dapat dilihat atau diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,471 dan signifikansinya sebesar 0,001. Nilai sig (0,001) < 0,05, ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan H_2 diterima.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah(2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dari tabel 3 dapat dilihat atau diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4.156 dan signifikansinya sebesar 0,000. Nilai sig (0,000) < 0,05, ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan H_3 diterima.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Indriasari (2008)membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif

Pemanfaatan Teknologi Informasidengan kualitas LKPD.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dari tabel 3 dapat dilihat atau diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4.037 dan signifikansinya sebesar 0,000. Nilai sig (0,000) < 0,05, ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan H_4 diterima.

Didalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tentang Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2015).

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internterhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Arifianti (2011) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Sistem Pengendalian Interndengan kualitas LKPD.

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima (peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah)

Dari tabel 3 dapat dilihat atau diketahui bahwa nilai t_{hitung}

sebesar 2.409 dan signifikansinya sebesar 0,019. Nilai sig (0,019) < 0,05, ini menunjukkan bahwa Peran inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan H₅ diterima.

Audit internal dapat mengurangi perilaku akuntansi agresif yang dilakukan manajemen. Keterlibatan fungsi audit internal dalam proses pelaporan keuangan menghasilkan transparansi yang lebih tinggi pada operasi perusahaan. Dengan adanya keterlibatan fungsi audit internal tersebut mengarahkan pada lingkungan yang lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fikri (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif peran audit internal terhadap kualitas Informasi laporan keuangan.

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Pengujian Koefisien Determinasi

model		Square	adjusted R Square	td. Error of the Estimate	urbin-Watson
1	0.939 ^a	0.882	0.874	2.60476	2.173

Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,882. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel

kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 88,2%. Sedangkan sisanya 11,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian ini adalah:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variable sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variable pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variable sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 5) Hasil hipotesis kelima menunjukkan bahwa variable peran inspektorat memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

- 6) Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,882 yang artinya bahwa terdapat 88,2% variable pada penelitian ini yang mempengaruhi pemanfaatan catatan atas laporan keuangan. Dan sisanya sebesar 11,8% dipengaruhi dari variabel lain.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesimpulan penelitian selanjutnya yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya dapat memperluas area survey penelitian, tidak hanya kota Pekanbaru tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dapat lebih mewakili seluruh populasi staff keuangan serta agar tercapainya tujuan generalisasi.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode lain selain kuisioner seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat lebih meyakini jawaban yang diberikan responden mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu disarankan pula untuk menambahkan informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang meliputi analisis laporan keuangan dan yang belum masuk dalam kuisioner penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Tyas Dian., 2014, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik :

Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 3, No 3 (2014). Jakarta.

Arfianti, Dita, 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tesis, Semarang : PPs– UNDIP.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.

Fikri, M. Ali, 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Penelitian: Universitas Mataram, NTB*.

Fitria, Rani. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak)*. Skripsi. Universitas Riau

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Hamzah, Ardi, 2009. Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan teknologi informasi(SNATI). Yogyakarta, 20 Juni 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Indriasari Desi, dan Ertambang Nahartyo, 2008 *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. SNA XI Pontianak.
- Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta
- Nurillah, Assyifa. 2014 . Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK/05.2011 tentang pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Wahana Komputer. 2010. Panduan
Belajar MySQL Database
Server. Media Kita. Jakarta
Selatan.